

## ABSTRAK

**DEBBY ARTAMEVIRA MAULANA (1213050038), 2025: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pidana Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi 2019-2023 ditinjau Dari *Wide-Scope Deterrence Theory***

Tingkat pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tinggi di Kota Cimahi menjadi tantangan serius dalam optimalisasi pendapatan daerah dan penegakan hukum. Penegakan yang selama ini berfokus pada pendekatan administratif dan sanksi eksternal dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran PKB, khususnya dengan mempertimbangkan pendekatan teoritik yang lebih luas dan holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran PKB dalam kerangka hukum positif di Indonesia, (2) efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di Kota Cimahi, serta (3) penerapan prinsip-prinsip *Wide-Scope Deterrence Theory* dalam mengevaluasi efektivitas sanksi pidana atas pelanggaran PKB. Kerangka berpikir penelitian dibangun dengan mengintegrasikan teori penegakan hukum pidana, hukum pajak daerah, dan *Wide-Scope Deterrence Theory* yang menekankan pentingnya pendekatan ganda berupa sanksi eksternal dan kesadaran moral internal dalam menciptakan kepatuhan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada instansi terkait, yaitu Satlantas Polres Cimahi dan UPTD Samsat Kota Cimahi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi regulasi, praktik penegakan, dan relevansi teori dalam konteks lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran PKB di Indonesia masih terbatas, karena pelanggaran pajak umumnya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif, dan baru dikualifikasi sebagai tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan berat seperti pemalsuan dokumen; (2) proses penegakan hukum di Kota Cimahi relatif efektif dalam jangka pendek melalui razia dan penindakan administratif, namun belum berhasil membentuk kepatuhan jangka panjang karena pendekatan masih bersifat represif; dan (3) prinsip-prinsip *Wide-Scope Deterrence Theory* memberikan kerangka evaluatif yang relevan, dengan mendorong integrasi antara sanksi tegas dan pendekatan edukatif, moral, serta partisipatif sebagai kunci menciptakan budaya taat pajak yang berkelanjutan.